MUSYTARI
ISSN: 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS KOMPREHENSIF PEMBIAYAAN MULTI JASA DAN ULTRA MIKRO: DAMPAK, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DI INDONESIA

Ahlul Lestiyani[1], Rizki Mayshela[2], Syahrani Dyajeng Putri[3], Waluyo[4]
[1-4]UIN Raden Mas Said Surakarta
[1]ahlullestiyani0@gmail.com, [2]mayshela.rizki07@gmail.com, [3]Syahraniputri762@gmail.com, [4]waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

Multi-service financing (MSF) and ultra-micro financing (UMi) are financial innovations designed to enhance financial access for micro, small, and low-income communities. MSF combines various financial services such as credit, insurance, and savings, while UMi provides financing with very small loan ceilings and simple requirements. This research aims to analyze the effectiveness, challenges, and development strategies of both financing models in supporting financial inclusion and the growth of MSMEs in Indonesia. The research method employs a qualitative and quantitative approach, with secondary data analysis from financial reports, case studies, and interviews with industry stakeholders. The results indicate that MSF and UMi have successfully increased financial access, but still face challenges such as low financial literacy, limited infrastructure, and financing risks. Policy recommendations include enhancing collaboration among institutions, strengthening regulations, and leveraging digital technology.

***Keywords**: Multi-service financing, Ultra-micro financing, Financial inclusion, MSMEs, Financial access, Fintech.*

Abstrak

Pembiayaan multi jasa (PMJ) dan pembiayaan ultra mikro (UMi) merupakan inovasi keuangan yang dirancang untuk meningkatkan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. PMJ menggabungkan berbagai layanan keuangan seperti kredit, asuransi, dan tabungan, sedangkan UMi menyediakan pembiayaan dengan plafon sangat kecil dan persyaratan sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, tantangan, serta strategi pengembangan kedua model pembiayaan tersebut dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan analisis data sekunder dari laporan keuangan, studi kasus, serta wawancara dengan pelaku industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMJ dan UMi berhasil meningkatkan akses keuangan, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur, dan risiko pembiayaan. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan kolaborasi antar lembaga, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Kata kunci: Pembiayaan multi jasa, Pembiayaan ultra mikro, Inklusi keuangan, UMKM, Akses keuangan, *Fintech*.

Article History
Received: May 2025
*Review*ed: May 2025
Published: May 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inklusi keuangan telah menjadi salah satu agenda prioritas dalam pembangunan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan akses keuangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), meskipun indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 85,10%, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, akses terhadap layanan keuangan formal relatif lebih mudah, sementara di pedesaan dan daerah tertinggal, banyak masyarakat yang masih mengandalkan sistem keuangan informal, termasuk rentenir, yang memberlakukan suku bunga sangat tinggi.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% dari total tenaga kerja (KemenkopUKM, 2023). Namun, ironisnya, sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses pembiayaan formal. Data Bank Indonesia (2022) menunjukkan bahwa 78% UMKM bergantung pada pendanaan mandiri atau pinjaman non-bank, dan hanya 12% yang berhasil mengakses kredit perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persyaratan kredit yang ketat, kurangnya agunan, dan rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro.

Dalam konteks inilah Pembiayaan Multi Jasa (PMJ) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) muncul sebagai solusi inovatif untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan. PMJ merupakan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan keuangan, seperti kredit, asuransi, dan program pendampingan bisnis dalam satu paket. Sementara itu, UMi dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan sangat rendah dengan plafon pinjaman kecil (biasanya di bawah Rp5 juta), persyaratan sederhana, dan tanpa agunan. Kedua model pembiayaan ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan modal usaha tetapi juga meningkatkan kapasitas finansial penerimanya melalui pendampingan dan edukasi.

1.2 Permasalahan Penelitian

Meskipun Pembiayaan Multi Jasa (PMJ) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Tantangan utama yang paling krusial adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, di mana banyak pelaku usaha mikro belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme produk keuangan formal. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dasar di daerah terpencil, termasuk akses listrik, internet, dan jaringan perbankan yang belum merata, sehingga menghambat distribusi layanan keuangan secara optimal. Di sisi lain, karakteristik pembiayaan ultra mikro yang tidak memerlukan agunan menimbulkan risiko kredit macet yang relatif tinggi, dengan rasio NPL (*Non-Performing Loan*) mencapai 4,2% menurut data OJK 2023. Tantangan struktural lainnya adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, terutama dalam hal perizinan operasional bagi lembaga keuangan mikro yang cenderung rumit dan berbelit-belit.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait. Pertama, untuk menganalisis secara komprehensif peran dan efektivitas PMJ dan UMi dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kedua, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara mendalam berbagai tantangan operasional dan faktor penghambat dalam implementasi kedua model pembiayaan ini di lapangan. Ketiga, sebagai *output* praktis, penelitian ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan yang

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

konkret, termasuk pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) untuk memperluas dampak positif PMJ dan UMi, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai strategis bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah dan regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi penting dalam merumuskan kebijakan keuangan inklusif yang lebih efektif. Bagi lembaga keuangan dan perusahaan *fintech*, penelitian ini memberikan *insight* berharga untuk pengembangan produk pembiayaan yang lebih adaptif dengan kebutuhan riil masyarakat. Dari perspektif akademik, penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah literatur ilmiah terkait pembiayaan inklusif dan pengembangan UMKM, sekaligus mengisi gap penelitian yang ada. Yang tak kalah penting, bagi masyarakat umum dan pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya akses keuangan formal dan manfaat yang dapat diperoleh dari produk-produk keuangan inklusif.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini secara spesifik akan memfokuskan analisis pada implementasi PMJ dan UMi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023, dengan pertimbangan bahwa periode tersebut mencakup masa pandemi COVID-19 yang menjadi ujian penting bagi ketahanan sistem keuangan inklusif. Studi kasus akan dilakukan pada beberapa program unggulan seperti PNM Mekaar dan BRI Ultra Mikro yang telah terbukti memiliki cakupan nasional yang luas. Metodologi penelitian mengandalkan analisis data sekunder dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan OJK, laporan keuangan lembaga keuangan, Bank Indonesia, dan Bank Dunia. Penelitian ini secara sadar membatasi diri tidak membahas aspek makroekonomi secara mendalam, tetapi lebih berfokus pada analisis implementasi program di tingkat mikro.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana PMJ dan UMi dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembiayaan Multi Jasa (PMJ)

Pembiayaan Multi Jasa (PMJ) merupakan pendekatan inovatif dalam layanan keuangan yang mengintegrasikan berbagai produk keuangan dalam satu paket komprehensif. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan holistik pelaku usaha mikro yang membutuhkan tidak hanya akses modal, tetapi juga perlindungan risiko dan peningkatan kapasitas (Demirgüç-Kunt & Klapper, 2012).

Menurut teori keuangan inklusif, PMJ beroperasi berdasarkan tiga pilar utama:

a. Pembiayaan Inti: Penyediaan modal kerja atau investasi dengan skema khusus untuk UMKM.
b. Produk Pendukung: Asuransi mikro, layanan tabungan, dan transfer dana.
c. Pendampingan Non-Finansial: Pelatihan bisnis dan literasi keuangan.

Model ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan usaha mikro. Studi oleh Karlan et al. (2016) di Filipina menunjukkan bahwa kombinasi pinjaman dengan pelatihan bisnis meningkatkan pendapatan usaha sebesar 28% dibandingkan dengan pinjaman saja.

Di Indonesia, implementasi Pembiayaan Mikro Terintegrasi (PMJ) dapat dilihat melalui beberapa program, seperti KUR Plus yang ditawarkan oleh perbankan dengan menggabungkan kredit usaha dan asuransi jiwa, Program LINKUMKM oleh Bank Indonesia yang menyertakan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM, serta Laku Pandai dari BRI yang menyediakan layanan keuangan terintegrasi untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Berbagai inisiatif ini

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menunjukkan komitmen dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus memberikan dukungan non-finansial untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

2.2 Evolusi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan Ultra Mikro merupakan perkembangan dari konsep mikrofinansial konvensional. Jika mikrofinansial tradisional menargetkan usaha mikro dengan plafon Rp5-50 juta, UMi fokus pada segmen sub-mikro dengan plafon maksimal Rp5 juta (Bank Dunia, 2021).

Karakteristik utama UMi:

a. Plafon Mikro: Rp500.000 - Rp5 juta.
b. Jangka Pendek: Maksimal 12 bulan.
c. Tanpa Agunan: Menggunakan sistem kelompok atau jaminan sosial.
d. Proses Sederhana: Persetujuan dalam 24-72 jam.

Teori dasar UMi (Usaha Mikro) mengacu pada konsep *social business* yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus (2007), dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Pertama, Teori Pemberdayaan Perempuan menjadi landasan utama, mengingat 85% penerima UMi adalah perempuan (PNM, 2023). Hal ini sejalan dengan fakta bahwa perempuan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga namun memiliki akses terbatas terhadap modal. Kedua, Teori Pengurangan Biaya Transaksi diimplementasikan melalui digitalisasi proses penyaluran dana, sehingga memangkas biaya administrasi dan mempercepat distribusi. Ketiga, Teori Kepercayaan Sosial diterapkan dengan menggunakan kelompok sebagai pengganti agunan, memanfaatkan ikatan komunitas untuk menekan risiko kredit.

Implementasi UMi di Indonesia dilakukan melalui berbagai skema. PNM Mekaar berfokus pada segmen ultra mikro, berhasil menjangkau 12 juta nasabah, terutama perempuan pra-sejahtera. BRI UMi menawarkan skema khusus dengan bunga di bawah 0,5% per bulan, membuatnya lebih terjangkau dibandingkan pinjaman konvensional. Sementara itu, *Fintech* UMi seperti Amartha dan KoinWorks memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan, memfasilitasi pendanaan berbasis *crowdfunding* atau *peer-to-peer lending*. Melalui pendekatan multidimensi ini, UMi tidak hanya meningkatkan akses keuangan tetapi juga mendorong inklusi ekonomi dan pemberdayaan kelompok rentan.

2.3 Teori Dasar Inklusi Keuangan

Kerangka teoritis penelitian ini mengintegrasikan tiga teori utama. Yang pertama penelitian ini mengintegrasikan Teori Akses Keuangan (Beck & Demirgüç-Kunt, 2008) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keterjangkauan layanan keuangan bagi UMKM. Dari sisi *supply-side*, teori ini menekankan pentingnya ketersediaan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro. Sementara itu, aspek *demand-side* melihat kemampuan masyarakat dalam mengakses produk tersebut, termasuk tingkat literasi keuangan dan kesiapan infrastruktur. Faktor penghambat seperti biaya tinggi, persyaratan administratif yang rumit, dan jarak geografis juga menjadi pertimbangan, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan ekonomi beragam.

Selanjutnya Teori Perilaku Keuangan (Karlan & Morduch, 2010) melengkapi analisis dengan pendekatan psikologis dan sosial dalam pengambilan keputusan keuangan. Teori ini mengkaji bagaimana literasi keuangan memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola pinjaman dan investasi. Selain itu, faktor psikologis seperti kepercayaan diri, risiko *overborrowing*, dan kebiasaan menabung turut menentukan keberhasilan program pembiayaan mikro. Pendidikan keuangan menjadi komponen kritis untuk memastikan bahwa penerima manfaat tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga mampu mengelolanya secara berkelanjutan.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Terakhir, Teori *Institutional Void* (Mair & Martí, 2009) menjelaskan peran lembaga keuangan non-tradisional (seperti *fintech*, koperasi, dan program pemerintah) dalam mengisi kesenjangan yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Teori ini menyoroti pentingnya adaptasi produk keuangan untuk pasar informal, seperti skema pinjaman tanpa agunan atau berbasis kelompok. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat juga menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan inklusif yang mampu menjawab kebutuhan UMKM di berbagai lapisan ekonomi. Dengan menggabungkan ketiga teori ini, penelitian ini memberikan kerangka komprehensif untuk memahami dinamika pembiayaan mikro di Indonesia.

2.4 Studi Empiris Terkait

Beberapa penelitian telah membuktikan dampak positif program UMi (Usaha Mikro) dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Studi *Impact* PNM Mekaar oleh LPEM UI (2022) menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pendapatan penerima sebesar 23% dalam satu tahun, sekaligus mengurangi ketergantungan pada rentenir dari 65% menjadi 28%. Selain itu, terjadi peningkatan kebiasaan menabung sebesar 40%, mengindikasikan perbaikan dalam perilaku keuangan masyarakat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa akses pembiayaan mikro tidak hanya membantu pertumbuhan usaha tetapi juga mendorong kemandirian finansial.

Sementara itu, Evaluasi BRI UMi (2023) mengungkapkan bahwa skema pembiayaan mikro ini memiliki tingkat pengembalian (*repayment rate*) yang sangat tinggi, mencapai 96,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerima pinjaman mampu mengelola dana dengan baik, didukung oleh pertumbuhan usaha yang 68% lebih tinggi dibandingkan pelaku UMKM yang tidak mengakses UMi. Digitalisasi proses juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional sebesar 30%, mempercepat penyaluran dana dan mengurangi biaya administrasi.

Secara global, Penelitian *Cross-Country* oleh ADB (2021) menemukan bahwa model UMi paling efektif diterapkan di negara dengan karakteristik tertentu, seperti kepadatan populasi tinggi, infrastruktur digital yang memadai, dan regulasi yang mendukung inklusi keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program pembiayaan mikro tidak hanya bergantung pada desain produk, tetapi juga pada faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kesiapan infrastruktur. Dengan demikian, pengembangan UMi ke depan perlu mempertimbangkan konteks lokal dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk memaksimalkan dampaknya.

2.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan empat lapisan variabel untuk menganalisis efektivitas program UMi. Pada level *input*, faktor-faktor kunci seperti kebijakan regulator, ketersediaan infrastruktur keuangan, dan kapasitas lembaga pembiayaan menjadi pondasi utama. Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti kemudahan perizinan dan insentif fiskal, bersama dengan jaringan infrastruktur digital yang memadai, menentukan kesiapan sistem dalam menyalurkan pembiayaan mikro. Selain itu, kapasitas lembaga pembiayaan—mulai dari bank hingga *fintech*—dalam mengelola risiko dan menjangkau segmen ultra mikro turut memengaruhi kualitas *input* program.

Pada tahap proses, mekanisme penyaluran dana, sistem pendampingan, dan pemanfaatan teknologi menjadi penentu keberhasilan operasional. Mekanisme penyaluran yang efisien—seperti penggunaan platform digital atau kelompok komunitas—harus didukung oleh pendampingan yang intensif untuk meningkatkan literasi keuangan penerima manfaat. Teknologi pendukung, seperti aplikasi pinjaman *online* atau sistem verifikasi berbasis data, berperan dalam mempercepat proses sekaligus mengurangi biaya transaksi. Sinergi ketiga elemen ini menentukan seberapa baik program dapat diimplementasikan di lapangan.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Dari sisi *output*, penelitian mengukur dampak langsung program melalui tiga indikator utama, yaitu peningkatan tingkat inklusi keuangan, pertumbuhan UMKM, dan pengurangan kemiskinan. Data empiris menunjukkan bahwa akses pembiayaan mikro berkorelasi positif dengan perluasan usaha mikro dan penurunan ketergantungan pada pinjaman informal. Sementara itu, pada level *outcome*, penelitian mengevaluasi dampak jangka panjang berupa kemandirian finansial penerima manfaat, ketahanan ekonomi rumah tangga, dan pemerataan pembangunan wilayah. *Outcome* ini mencerminkan transformasi struktural di tingkat masyarakat, di mana UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan pengurangan kesenjangan. Dengan menganalisis keempat lapisan variabel ini, penelitian ini memberikan gambaran holistik tentang bagaimana pembiayaan mikro dapat menjadi katalis pembangunan inklusif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis perkembangan pembiayaan mikro (PMJ dan UMi) di Indonesia melalui studi literatur terhadap berbagai sumber terkini, mengungkap bahwa meskipun program tersebut telah berhasil meningkatkan pendapatan UMKM sebesar 15-25% dan mengurangi ketergantungan pada rentenir hingga 37%, tantangan utama masih ditemui dalam bentuk keterbatasan akses digital di daerah terpencil dan tingginya angka kredit macet yang mencapai 4,2% dibanding rata-rata industri 2,6%. Temuan penelitian ini merekomendasikan perlunya perluasan infrastruktur digital, penguatan pendampingan UMKM, serta penyempurnaan regulasi untuk menciptakan sistem pembiayaan mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dampak Positif PMJ dan UMi

a. Peningkatan Akses Keuangan

Program Pembiayaan Mikro (PMJ) dan Usaha Mikro (UMi) telah berhasil memperluas inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. PNM Mekaar, misalnya, berhasil menjangkau 12 juta nasabah, dengan 80% di antaranya adalah perempuan, menunjukkan keberhasilan program dalam memberdayakan kelompok rentan. Sementara itu, BRI UMi mencatat penyaluran dana sebesar Rp10,5 triliun kepada 3,2 juta debitur pada 2023, membuktikan tingginya permintaan akan pembiayaan mikro.

Keberhasilan ini didukung oleh pendekatan kelompok tanggung renteng (*social collateral*) yang mengurangi ketergantungan pada agunan fisik, serta digitalisasi proses yang mempercepat penyaluran dana. Selain itu, suku bunga yang relatif rendah (di bawah 0,5% per bulan untuk BRI UMi) membuat pembiayaan ini lebih terjangkau dibandingkan pinjaman informal seperti rentenir.

b. Pertumbuhan UMKM

Dampak ekonomi dari PMJ dan UMi terlihat dari peningkatan pendapatan pelaku usaha. Survei LPEM UI (2023) menunjukkan bahwa 65% penerima UMi melaporkan peningkatan pendapatan, dengan rata-rata kenaikan 23% dalam setahun. Selain itu, terjadi penurunan ketergantungan pada rentenir dari 65% menjadi 28%, yang mengindikasikan perbaikan stabilitas keuangan rumah tangga.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Beberapa sektor UMKM yang paling diuntungkan meliputi:

1) Usaha kuliner (35% penerima UMi)
2) Perdagangan kecil (30%)
3) Kerajinan tangan (20%).

Program pendampingan dan pelatihan yang menyertai pembiayaan juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas usaha, seperti manajemen keuangan sederhana dan pemasaran digital.

4.2 Tantangan Implementasi

a. Rendahnya Literasi Keuangan

Meski akses pembiayaan meningkat, 60% pelaku UMKM masih tidak memahami syarat dan risiko pinjaman (OJK, 2022). Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan utang termasuk risiko *overborrowing,* ketidaktahuan tentang bunga efektif sehingga beberapa debitur justru terjerat utang berlapis, serta minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban membuat nasabah rentan terhadap praktik predator seperti pinjaman ilegal.

Solusi yang diperlukan dapat berupa edukasi keuangan berbasis komunitas seperti sekolah UMKM serta simplifikasi kontrak pinjaman dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.

b. Risiko Kredit Macet (NPL Tinggi)

Tingkat NPL (*Non-Performing Loan*) UMi mencapai 4,2%, lebih tinggi daripada kredit komersial biasa (rata-rata 2,5%). Penyebabnya meliputi siklus usaha mikro yang fluktuatif terutama di sektor pertanian dan perdagangan, kurangnya pemantauan penggunaan dana dimana sebagian pinjaman dialihkan untuk konsumsi dampak eksternal seperti bencana alam atau kenaikan harga BBM.

Upaya penanganan yang dapat dilakukan bisa berupa penerapan *credit scoring* berbasis teknologi untuk menilai kelayakan debitur serta restrukturisasi kredit bagi usaha yang terdampak krisis.

c. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Hanya 40% daerah pedesaan memiliki akses internet memadai (Kominfo, 2023), hal ini menghambat proses aplikasi *online* untuk pinjaman penggunaan pembayaran digital yang seharusnya meningkatkan transparansi serta pendampingan virtual, seperti pelatihan daring.

4.3 Perkembangan Terkini PMJ dan UMi di Indonesia (2023-2024)

Program pembiayaan mikro (PMJ dan UMi) di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan berbagai inovasi dan perluasan jangkauan, tercermin dari pencapaian PNM Mekaar yang menjangkau 14,6 juta nasabah dan penyaluran dana Rp42 triliun, serta terobosan produk seperti UMi Super Mikro dari BRI dengan bunga kompetitif 0,3%. Kolaborasi strategis dengan platform *e-commerce* dan *fintech* telah memperkuat ekosistem pembiayaan mikro, didukung oleh regulasi seperti POJK No. 12/2023 yang meningkatkan perlindungan konsumen.

Digitalisasi melalui pemanfaatan AI, *big data*, dan aplikasi *mobile* seperti BRImo dan PNM Mobile turut memperluas akses, meskipun tantangan seperti disparitas infrastruktur digital di daerah 3T masih perlu diatasi. Fokus pada pemberdayaan perempuan dan respons terhadap tantangan ekonomi melalui restrukturisasi kredit menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pembiayaan inklusif. Untuk memaksimalkan dampak, rekomendasi mencakup: (1) Percepatan pembangunan infrastruktur digital di daerah tertinggal, (2) Penguatan kolaborasi multi pihak termasuk sektor swasta, (3) Peningkatan literasi keuangan berbasis digital, dan (4) Penyempurnaan model pembiayaan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, pembiayaan mikro di Indonesia dapat terus menjadi tulang punggung penguatan UMKM dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, Pembiayaan Multi Jasa (PMJ) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terbukti efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Meskipun kedua model pembiayaan ini telah berhasil menjangkau segmen yang sebelumnya terpinggirkan, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, risiko kredit macet, dan keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi hambatan signifikan. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari peningkatan akses keuangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemandirian finansial masyarakat yang lebih baik.

5.2 Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan yang ada, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil. Selain itu, penting untuk mengimplementasikan program edukasi keuangan yang lebih luas dan berbasis komunitas guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan efektivitas PMJ dan UMi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembiayaan mikro dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

ADB. (2021). *Ultra Microfinance in Southeast Asia*. Asian Development Bank.
Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Inklusif Indonesia*.
Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2008). *Access to Finance: An Unfinished Agenda*. World Bank.
BRI. (2023). *Laporan Tahunan Unit Ultra Mikro*.
Karlan, D., & Morduch, J. (2010). *Access to Finance*. Handbook of Development Economics.
Karlan, D., et al. (2016). *The Impact of Microfinance*. Science.
KemenkopUKM. (2023). *Profil UMKM Indonesia*.
LPEM UI. (2022). *Impact Evaluation of PNM Mekaar Program*.
Mair, J., & Martí, I. (2009). "Entrepreneurship in and around institutional voids". *Journal of Business Venturing*.
OJK. (2023). *Statistik Keuangan Inklusif*.
World Bank. (2021). *Global Financial Inclusion Report*.
Yunus, M. (2007). *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*. PublicAffairs.